

## BAB IV

### LEMAHNYA MILITER INDONESIA

Sudah lebih dari satu dasawarsa transisi demokrasi di Indonesia, dan reformasi dibidang pertahanan ternyata masih menyisakan banyak persoalan. Akibatnya pelaksanaan fungsi dan tugas militer Indonesia dalam menghadapi ancaman pada kedaulatan negara menjadi tidak maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara, militer membutuhkan struktur dan postur yang secara efektif dan professional mampu menjalankan tugasnya dengan ditunjang anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Tanpa kekuatan militer pendukung, tak satupun negara yang bisa menghindari tekanan atas kepentingan negara lainnya. Dengan dukungan kapabilitas militer yang handal, diplomasi menjadi sarana jalan *pre-emptive strike* terhadap ancaman nonmiliter, yang bekerja melalui tampilan *deterence effect*. Bagaimanapun, keefektifan diplomasi suatu negara bergantung pada sejauh mana kekuatannya.<sup>66</sup> Namun bagaimana dengan kekuatan militer kita saat ini bila dihadapkan dengan masalah penjagaan terhadap pulau-pulau terluar khusus nya pada wilayah Ambalat.

#### A. Embargo Militer Indonesia oleh Amerika Serikat

Dilihat dari latar belakangnya, embargo militer oleh Amerika Serikat tidak terlepas dari problem sepak terjang militer Indonesia di masa lalu, yang dianggap telah terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor timur. Embargo militer berawal

---

<sup>66</sup> *Ibid*, Hal 8

dari kerusuhan di Santa Cruz, Timor Timur pada 12 November 1991, yang menewaskan sekitar 200 orang. Embargo militer total terhadap TNI diberlakukan setelah terjadinya kasus kekerasan dan pembumi hangusan yang dituding oleh Amerika Serikat dilakukan oleh Militer Indonesia pasca jajak pendapat di Timor Timur pada tahun 1999. Daftar kekerasan dan pelanggaran HAM menjadi dasar Amerika Serikat bagi penetapan status embargo. Pasca kasus tahun 1999, muncul pula tambahan beberapa pertimbangan lain seperti terjadinya kasus-kasus baru, di antaranya kasus penembakan warga Amerika Serikat di Timika, Papua, serta pertimbangan terhadap keseriusan Pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum atas berbagai pelanggaran HAM oleh militer dan reformasi di dalam tubuh TNI.<sup>67</sup>

Embargo terhadap Indonesia tersebut menjadikan peralatan yang dimiliki oleh TNI menjadi tidak efisien, bukan saja dikarenakan kesulitan dalam perawatan dan pemeliharaan peralatan yang ada, bahkan untuk membeli peralatan baru juga tidak memungkinkan. Pemberlakuan embargo militer oleh Amerika Serikat terhadap TNI, tak pelak lagi membawa pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh TNI, karena sebagian besar Alutsista yang dimiliki oleh TNI berasal dari Amerika Serikat. Hal tersebut mempengaruhi kesiapan Alutsista yang dimiliki oleh TNI, karena kesulitan untuk mendapatkan suku cadang bagi peralatan tempur seperti F-16, hal itu juga telah mengurangi kesiapan yang dimiliki oleh pesawat tempur tersebut. Sehingga jika terjadi konflik atau ancaman dari negara lain, maka hal ini tentu saja akan sangat merugikan

---

<sup>67</sup> [http://adrianusmeliala.com/files/pub2/fpub2\\_8082006084934.doc](http://adrianusmeliala.com/files/pub2/fpub2_8082006084934.doc) diakses pada 25 Juli 2010

bangsa Indonesia sendiri karena merupakan ancaman terhadap keutuhan wilayah kedaulatan NKRI. Armada TNI Angkatan Laut tidak bisa menjaga keamanan wilayah laut secara intensif, sehingga pencurian kekayaan laut semakin marak terjadi di wilayah perairan Indonesia. Di wilayah udara, Militer Indonesia pun tidak mampu mencegah pesawat-pesawat tempur asing yang dengan sengaja memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Yang menyedihkan adalah ketika bencana tsunami di Aceh terjadi, TNI tidak punya peralatan angkut yang berkapasitas besar dan bergerak cepat dalam menangani terjadinya bencana<sup>68</sup>.

Selama pemberlakuan embargo militer oleh Amerika Serikat tersebut, telah mengakibatkan kekuatan dan kemampuan militer Indonesia berkurang dalam hal modernisasi sistem persenjataan dan peralatan tempurnya. Termasuk juga kemampuan teknis militer, nyaris tidak mengalami peningkatan sebagaimana ketika program kerjasama pendidikan dengan AS masih berjalan.

## **B. Kondisi Alat Utama Sistem Pertahanan Indonesia** -----

Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam mengukur kekuatan TNI sebagai alat pertahanan, yang berfungsi untuk melindungi NKRI dari berbagai bentuk ancaman perang. Oleh karena itu, kekuatan angkatan perang suatu negara akan ditakuti negara lain salah satunya dari peralatan perang mereka, serta teknologi yang dikuasainya. Apalagi dalam menghadapi perang yang sifatnya tidak langsung, karena perhitungan

---

<sup>68</sup> Yuddy Crisnandi, *Reformasi TNI*, LP3ES, Jakarta, 2005, Hal 109

efisiensi dan menghindari korban yang begitu banyak, maka kecanggihan alat teknologi merupakan suatu kebutuhan.

Untuk menghadapi situasi dan perkembangan ancaman maupun bentuk perang yang tidak lagi konvensional, penguasaan atas teknologi militer terkini bagi militer merupakan suatu keharusan. Sayangnya, kondisi riil Alutsista TNI masih sangat memprihatinkan, karena sebagian besar Alat Utama Sistem Pertahanan mereka adalah warisan peralatan tahun 1960-an, 1970-an dan 1980-an. Kondisi ini membuat Militer Indonesia dilecehkan dan dianggap remeh oleh negara lain karena ketidak mampuannya dalam meng-*counter* ancaman dari militer asing.<sup>69</sup>

Kondisi pertahanan suatu negara tentu saja, salah satunya bisa dilihat dari kondisi Alutsista angkatan bersenjata. Semakin kuat, canggih, modern, efektif dan efisien Alutsista suatu negara, biasanya menunjukkan semakin kuat pula pertahanannya. Negara Superpower, Amerika Serikat, selain didukung oleh kekuatan ekonominya tentunya didukung pula oleh kemampuan Alutsista yang dimiliki oleh militer mereka. Dibawah ini adalah Tabel mengenai Persentase Kesiapan Alutsista yang dimiliki oleh Militer Indonesia:

**Tabel 1. 1**

**Persentase Kesiapan Alutsista Militer Indonesia**

Uraian	TNI AD	TNI AU	TNI AL
Pesawat	53,51 %	45,82 %	52 %
Ranmor	85,04 %		
Ranpur	71,79 %		36,09 %
Kapal Perang			50,82 %
Radar		18,75 %	

<sup>69</sup> <http://www.detiknews.com/read/2010/01/29/141033/1289024/10/duh-tank-tua-tni-keras-suaranya-lambat-jalannya> diakses pada 22 Juli 2010

Sumber : *Dephan* 2005

Berdasarkan data Kekuatan Matra Darat, kendaraan tempur dari berbagai jenis sebanyak 872 unit, dan yang siap dioperasikan sebanyak 703 unit atau 71,79 %. Kendaraan bermotor dari berbagai jenis sebanyak 25.716 unit yang siap dioperasikan 20.572 unit atau 85,04 %, dan pesawat terbang dari berbagai 61 unit yang siap operasi hanya 30 unit atau sekitar 53,51 %. Kekuatan Matra Laut; kapal perang (KRI) sebanyak 133 unit yang siap dioperasikan sebanyak 67 unit atau sekitar 50,82 %, kendaraan tempur marinir dari berbagai jenis sebanyak 435 unit yang siap operasional hanya 157 unit, atau sekitar 36,09 %, pesawat terbang 75 unit yang siap operasional hanya 36 unit atau 52 %. Terakhir, Kekuatan Matra Udara; pesawat terbang dari berbagai jenis 251 unit yang siap operasi hanya 112 unit atau 45,82 %, dan radar 16 unit yang siap operasi hanya 3 unit atau sekitar 18,75 %<sup>70</sup>.

Secara idealnya atau berdasarkan rancangannya, tumpuan kekuatan Alutsista TNI AL didasarkan pada kesiapan operasional kapal tempur maupun kapal angkut, pesawat udara dan Ranpur marinir yang diintegrasikan kedalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Namun dalam kenyataannya, dari sebanyak 207 unit KAL (Kapal Angkatan Laut) dari berbagai jenis yang siap operasi hanya sebanyak 76 unit atau hanya sebesar 36,71 %. Sedangkan dari sebanyak 435 unit Ranpur (Kendaraan Tempur) Marinir dari berbagai jenis, hanya sebanyak 157 unit yang siap dioperasikan atau hanya sebesar 36,09 %. Pesawat

---

<sup>70</sup> *Ibid* Hal 57

Udara yang dimiliki TNI AL saat ini berjumlah 75 unit, namun hanya 52 % dari jumlah tersebut yang dapat dioperasikan atau sebanyak 36 unit pesawat udara.<sup>71</sup>

Dengan kondisi Alutsista militer Indonesia tersebut apa risikonya?. Sebagai contoh, kesulitan mendapatkan suku cadang bagi sejumlah pesawat TNI telah mempengaruhi tingkat kesiapan Alat Utama Sistem Pertahanan, khususnya untuk menopang perpindahan pasukan dalam mengatasi wilayah konflik (*trouble spot*) lebih dari satu. Hal ini disebabkan karena kekuatan pesawat udara untuk mengangkut pasukan masih sangat minim. TNI hanya mempunyai sembilan (9) Pesawat Hercules C-130, padahal kesiapan pesawat angkut Hercules C-130 tersebut hanya mampu mendukung pemindahan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) menuju satu lokasi *trouble spot* (wilayah konflik). Idealnya, sedikitnya perlu ada 18 unit pesawat angkut C-130 Hercules yang selalu siap untuk sewaktu-waktu bisa digunakan memindahkan PPRC itu minimal menuju dua *trouble spots* secara simultan atau bersamaan<sup>72</sup>. Dampak dari embargo militer oleh Amerika Serikat dan sekutunya tersebut tak pelak lagi membuat menurunnya persentase kesiapan Alutsista Udara yang dimiliki oleh TNI.

Dalam upaya mengamankan wilayah nusantara, tentara dalam tugasnya tentu juga haruslah dibekali dengan senjata dan pendukungnya dalam jumlah memadai. Tentara dalam tugas pengamanan perbatasan, pertahanan dan penjagaan wilayah laut, udara, dan darat, tentunya tak bisa hanya dibekali dengan bambu runcing, perahu dayung, dan pesawat peninggalan dulu kala. Agar mereka terlatih, para prajurit jelas membutuhkan pendidikan dan latihan pula. Dengan kondisi

<sup>71</sup> Connie Rahakundini Bakrie Msi, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, Hal 108

<sup>72</sup> <http://crazeespidey.multiply.com/journal/item/49> diakses pada 19 Juli 2010

demikian, tentu kondisi Alutsista militer Indonesia saat ini terasa sangat kurang ideal bagi upaya memperkuat sistem pertahanan Indonesia.

## **B. Minimnya Anggaran Pertahanan**

Alokasi anggaran pertahanan penting untuk membangun ketahanan Negara. Dalam memenuhi kebutuhan Alutsista, biasanya militer Indonesia sangat bergantung kepada pembelian dari luar negeri dimana anggarannya juga menggunakan alokasi. Sehubungan dengan persoalan anggaran, Untuk memenuhi kebutuhan Alat Utama Sistem Pertahanan. Pemerintah Indonesia masih belum mampu menyediakan dana tunai karena alokasi yang ada untuk memenuhi kebutuhan rutin saja masih kurang mencukupi.

Sejak tahun 1999, anggaran pertahanan negara tidak lebih dari 1 % PDB. Anggaran pada tahun 2006 saja hanya sebesar 0,93 dari PDB. Kondisi ini jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara di Asia Tenggara relatif sangat rendah, bahkan Indonesia berada jauh dibawah rata rata anggaran pertahanan Asia Tenggara.<sup>73</sup> Padahal Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, apalagi jika dibandingkan dengan negara negara di Asia Pasifik.

Minimnya anggaran untuk pertahanan terjadi pada pasca krisis 1997-1998. Sepanjang masa pemulihan ekonomi, Pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan anggaran untuk pengentasan masalah kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Selama masa itu, anggaran pertahanan memang

---

<sup>73</sup> *Ibid*, Hal 48

terabaikan. Akibat anggaran yang minim, Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) Indonesia juga lemah. Kondisi ini berdampak langsung pada kurang memadainya sistem pertahanan yang dimiliki oleh Militer Indonesia.

Pemerintah harus dihadapkan kepada pilihan memenuhi kebutuhan minimal pertahanan, atau memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selama ini pengadaan alutsista lebih banyak dibiayai dengan utang luar negeri. Dana dari rupiah murni (non utang), dialokasikan untuk kebutuhan operasional. Apalagi untuk beli kapal perang, pesawat tempur dan sebagainya pemerintah masih berhutang. Berikut ini adalah alokasi anggaran untuk pertahanan pada tahun 2009:

**Tabel 1. 2**

**Anggaran Pertahanan Tahun 2009**

Anggaran Pertahanan Tahun 2009		
TNI AU	3,98 Trilyun	58 Satuan Kerja
TNI AD	16,1 Trilyun	129 Satuan Kerja
TNI AL	5,5 Trilyun	47 Satuan Kerja
Dephan	6,3 Trilyun	2 Satuan Kerja
Mabes TNI	4,5 Trilyun	11 Satuan Kerja
Jumlah	36,4 Trilyun	247 Satuan Kerja

Sumber : *Dephan*

Pada tahun 2009, dari Rp 36,4 Triliun, TNI Angkatan Darat secara nominal mendapat porsi anggaran terbesar sekitar Rp 16,1 Triliun. Akan tetapi dana itu dialokasikan untuk 129 Satuan Kerja (Satker). Lalu, TNI Angkatan Laut dialokasikan sebesar Rp 5,5 triliun yang akan didistribusikan ke 47 satker dan untuk TNI Angkatan Udara menerima alokasi anggaran sebesar Rp 3,98 Triliun,

yang didistribusikan ke 58 Satuan Kerja. Untuk Dephan yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 6,3 Triliun, besaran dana itu didistribusikan hanya ke dua Satker yang ada sementara untuk Mabes TNI, dari total alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp4,5 Triliun, besaran itu didistribusikan untuk 11 Satker<sup>74</sup>.

Naiknya anggaran pertahanan pada tahun 2010 sebesar 20 persen, merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi TNI. Dengan demikian, anggaran pertahanan 2010 mencapai Rp 40,6 triliun, naik dari Rp 36,4 triliun pada tahun 2009. Namun Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah mengamanatkan, anggaran tahun 2010 diprioritaskan untuk perbaikan kesejahteraan personil TNI. Alutsista yang belum begitu mendesak dari luar negeri untuk sementara ditunda pembeliannya, 65 persen anggaran pertahanan diperuntukkan pada kesejahteraan dan profesionalisme. Dari 65 persen itu, dialokasikan untuk peningkatan gaji, uang makan, uang lauk-pauk dan rehabilitasi serta pembangunan rumah dinas dan rumah non-dinas.<sup>75</sup>

Kebutuhan minimal Departemen Pertahanan dan TNI idealnya sekitar Rp 100,53 Triliun. Namun hanya terpenuhi kurang dari setengahnya yaitu sekitar Rp 35-36 Triliun. Daya dukung anggaran negara untuk mewujudkan kemampuan pertahanan negara sangat terbatas dengan nilai + 1% dari PDB, sedangkan Indonesia termasuk negara yang tingkat ancamannya tinggi sehingga membutuhkan anggaran 4 - 5% dari PDB.<sup>76</sup> Keterbatasan anggaran ini menjadi kendala dalam pemeliharaan Alutsista maupun pengadaan Alutsista yang baru.

---

<sup>74</sup> <http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Utama&id=52075> diakses pada 15 Juli 2010

<sup>75</sup> <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=245242> diakses pada 6 Agustus 2010

<sup>76</sup> <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=15&mnurutisi=6> diakses pada 17 juli 2010

Jika dilihat kebelakang, pada masa Orde Baru misalnya, pemerintah menyediakan anggaran khusus untuk pembelian peralatan produksi Industri Strategis Nasional, yaitu melalui program *On-Top* yang sekarang sudah tidak ada lagi. Ternyata pembelian peralatan dari Industri dalam negeri juga terhambat dengan jadwal waktu penyerahan pesanan yang relatif lambat. Setelah terjadinya krisis moneter perusahaan-perusahaan industri strategis tersebut mengalami kesulitan permodalan yang sangat signifikan sehingga keberadaannya berada dibawah Departemen Keuangan.

Seringnya terjadi kecelakaan pesawat yang dimiliki oleh TNI, juga ditengarai karena minimnya ketersediaan anggaran untuk sistem pertahanan. Peristiwa jatuhnya pesawat milik TNI sangat sulit dipisahkan dengan kondisi pengalokasian anggaran untuk pertahanan Indonesia yang sangat luas ini. Sejak tahun 1991, tercatat terjadi 16 kali kecelakaan pesawat TNI. Dibawah ini adalah data mengenai kecelakaan yang dialami oleh pesawat-pesawat yang dimiliki oleh Militer Indonesia:

**Tabel 1. 3**

**Data Kecelakaan Pesawat Militer Indonesia  
(1991-2009)**

No	Tanggal	Jenis Pesawat	Korban	Lokasi
1	5 Oktober 1991	Hercules TNI AU C 130	135 orang tewas	Condet Jakarta Timur
2	8 Januari 2001	Cassa Nurtanio (CN) 212 TNI AL	10 orang tewas termasuk Korbannya Pangdam VIII Trikora Mayjen TNI Tonny	Desa Selimo, Kurima, Kab. Jayawijaya, Irian

			Rompis.	Jaya
3	20 Desember 2001	Hercules TNI AU A 1329 TNI AU	Seluruh penumpang selamat	Lhokseumawe, Aceh
4	7 November 2002	Cassa BN-2 A	7 orang tewas	Bandara Juwita Tarakan
5	20 Juni 2004	Cessna 185 Skywagon	Korbannya atlet terjun payung Edy Cristiono tewas	Bogor
6	23 Desember 2004	Helicopter Super Puma TNI AU	14 orang tewas	Desa Surgede Kecamatan Kejajar Wonosobo
7	22 Februari 2005	Cassa 212-200 Polri	15 orang tewas	Bandara Mararena Papua
8	21 Juli 2005	CN-235 Alfa 2301 TNI AU	3 personel TNI tewas dan Sultan Deli Tuanku Othman Mahmud Perkasa Alamsyah tewas	Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe
9	19 Juli 2006	Cassa 212-200 TNI Angkatan Darat		Tambak Cilendek, Semarang
10	23 Juli 2007	OV 10F Bronco	1 orang tewas	Lanud Abdurrahman Saleh, Malang Jatim
11	30 Desember 2007	Nomad TNI Angkatan Laut (AL)	2 orang tewas	Perairan Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam
12	11 Maret 2008	Helikopter latihan TNI AU jenis Bell-47G Soloy buatan tahun 1976	Lettu Engky Saputra Jaya tewas, sementara Prada	Desa Wanasari, Subang

			Ridi W mengalami luka berat.	
13	26 Juni 2008	Cassa TNI AU A212-200	18 penumpang tewas	kawasan Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat
14	6 April 2009	Fokker 27	24 orang tewas	Hangar Bandara Husein Sastranegara Bandung
15	20 Mei 2009	Hercules C 130	101 orang tewas dan 11 luka	persawahan desa Jeplak Kecamatan Karas Magetan.
16	8 Juni 2009	Heli Bolkow TNI AD	3 Personel TNI Tewas	Kampung Pasir Rengit, Desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Sumber : Dephan 2009

Sebagian besar kasus kecelakaan pesawat ini banyak memakan korban jiwa para prajurit TNI. Jatuhnya pesawat C-130 Hercules Alpha 1325 di Magetan, Jawa Timur, 20 Mei 2009 yang lalu contohnya, tentulah membuat kita terenyuh akan duka yang diderita para korban maupun keluarga jatuhnya pesawat itu. Suatu hal yang miris bahwa para prajurit TNI harus mengatakan siap untuk segala tanggung jawab yang diembannya, namun tidaklah didukung oleh kesiapan pesawatnya. Hasilnya pesawat itu dalam sebuah istilah, dapat dikatakan sekaligus

sebagai “peti mati” bagi para prajurit kita. Kecelakaan demi kecelakaan ini memicu polemik soal minimnya anggaran yang diperuntukkan bagi Militer Indonesia.

Minimnya anggaran tersebut berdampak pada poin kesalahan, yakni kebiasaan untuk mendaur ulang alat-alat yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan operasional yang layak. Poin itu merupakan penyebab signifikan dari terjadinya kecelakaan pesawat, sekaligus akibat langsung dari keterbatasan anggaran<sup>77</sup>. Peralatan TNI yang usianya sudah tua, seperti pesawat angkut Hercules, Tank AMX-13, Kapal perang maupun kapal patroli TNI-AL juga memerlukan perawatan dan perbaikan yang biayanya sangat tinggi. Pesawat C-130 Hercules buatan tahun 80-an misalnya, idealnya dipakai sekitar delapan tahun atau 3.000 jam terbang. Pengadaan suku cadang untuk pesawat Hercules tipe B hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa unit milik TNI AU yang beroperasi.<sup>78</sup>

Akibat keterbatasan anggaran tersebut, maka hanya separuh dari sembilan unit pesawat angkut Hercules tipe B milik TNI yang beroperasi. Kondisi demikian masih tergolong lebih baik bila dibandingkan era sebelum pencabutan embargo suku cadang peralatan militer oleh AS per 2007 silam. Suku cadang yang embargonya dicabut sejak 2007 hanya cukup untuk mendukung operasional separuh dari total sembilan Hercules tipe B milik TNI.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> <http://www.detiknews.com/read/2004/01/29/141033/1289024/10/kecelakaan-pesawat-Puma-SA-330-yang-jatuh-pada-12-Juni-2009-TNI-AU> diakses pada 25 Juli 2010

<sup>78</sup> <http://damnthetorpedo.blogspot.com/2008/09/pesawat-angkut-Hercules,-Tank-AMX-13.htm>, diakses pada 26 Juli 2010

<sup>79</sup> *ibid*

Hal ini memerlukan pemikiran yang serius bagi pemerintah Indonesia. Dengan anggaran yang tidak tetap untuk pertahanan, dipastikan pula secara riil nilainya akan turun naik. Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya fluktuasi nilai tukar mata uang, nilai barang saat pengadaan akan lebih mahal jika anggaran yang disediakan relatif tetap atau sama berarti itu praktis turun karena ada inflasi. Akibat anggaran yang minim, Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) Indonesia juga lemah. Kondisi ini berdampak langsung pada kurang memadainya sistem pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia.

### **C. Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia-Malaysia**

“Ganyang Malaysia” mungkin itulah seruan yang sering kita dengar jika terjadi konflik antara Indonesia dan Malaysia. Seruan itu kembali sering terdengar ketika memanasnya hubungan antara Indonesia–Malaysia dalam kasus Ambalat. Militer Malaysia melalui kapal perangnya telah melakukan tindakan provokasi terhadap Indonesia dengan memasuki wilayah perairan Ambalat yang nyata nyata merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Hal tersebut memicu emosi sebagian besar rakyat Indonesia dan bahkan tidak sedikit yang menyerukan perang terhadap Malaysia.

Bagaimana jika jalan penyelesaian secara diplomasi gagal dan menemui jalan buntu, sehingga perang tak dapat dihindarkan sebagai jalan terakhir dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Malaysia berani bersikap arogan dengan melanggar wilayah Indonesia karena mereka tahu kita tidak memiliki kekuatan militer yang memadai untuk menangkal mereka. Tabel dibawah ini akan menggambarkan kekuatan yang dimiliki oleh Militer Indonesia dan Malaysia:

**Tabel 1. 4**  
**Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia dan Malaysia**

<b>Uraian</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Malaysia</b>
Luas Wilayah	1.900.000 Mil Persegi	329.847 Mil Persegi
Jumlah Penduduk	241.973.879	27.475.136
Jumlah Personil Militer	369.389 Personil	196.042 Personil
Rasio Personil Militer dan Jumlah Penduduk	1 : 650	1 : 150
Rasio Personil Militer dan Luas Wilayah	1 : 5	1 : 1,6
Anggaran Militer Per- Tahun	US 1 Triliun (1,3 persen GDP)	US 1,69 Triliun (2,03 persen GDP)
Pesawat Tempur /Helikopter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 Sukhoi Su-27SK dan Su-30MK berpangkalan di Makassar</li> <li>- 5 F-16A berpangkalan di Madiun</li> <li>- 5 F-16B berpangkalan di Madiun</li> <li>- F-5E berpangkalan di Madiun</li> <li>- F-5F berpangkalan di Madiun</li> <li>- Hawk Mk53 berpangkalan di Madiun</li> <li>- 8 Hawk MK 109 berpangkalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 Sukhoi Su-30MKM Flanker-C</li> <li>- 14 MiG-29N Fulcrum-A berpangkalan di Kuantan</li> <li>- 2 MiG-29NUB Fulcrum-B berpangkalan di Kuantan</li> <li>- 8 F/A-18D Hornet</li> <li>- 8 F-5E Tiger II</li> <li>- 3 F-5F Tiger II</li> <li>- 18 Hawk Mk.208</li> <li>- 2 RF-5E Tigereye</li> <li>- 11 Cessna</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>di Pekanbaru dan Pontianak</li> <li>- 32 Hawk MK 209 berpangkalan di Pekanbaru dan Pontianak</li> <li>- 6 CN235 berpangkalan di Halim</li> <li>- 8 F27-400M berpangkalan di Halim</li> <li>- SF260MS/WS berpangkalan di Halim</li> <li>- B707-3MIC</li> <li>- 7 Pesawat F27-400M</li> <li>- F28-1000/3000</li> <li>- L100-30</li> <li>- C-130H-30 berpangkalan di Halim</li> <li>- NAS332L1</li> <li>- L100-30</li> <li>- EC-120B</li> <li>- 12 unit Heli Bell 47G-3B-1 berpangkalan di Kalijati</li> <li>- NC212M-100/200 berpangkalan di Malang</li> <li>- Ce 401A berpangkalan di Malang</li> <li>- Ce 402A berpangkalan di Malang</li> <li>- 10 Pesawat Bronco OV-10F di Malang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utililiner</li> <li>- 14 C-130H Hercules</li> <li>- 6 C-130H-30 Hercules</li> <li>- 2 C-130T Hercules</li> <li>- 3 C-130MP Hercules</li> <li>- 1 L-100-30 Hercules</li> <li>- 7 CN-235-220M berpangkalan di Kuala Lumpur</li> <li>- 1 Dassault Falcon 900B</li> <li>- 4 Beech 200 Super King Air</li> <li>- DHC-4A Caribou</li> <li>- 2 AS-61NS Sea King</li> <li>- 2 S-70A Black Hawk</li> <li>- Mi-171Sh Hip-H</li> <li>- 30 S-61A-4 Nuri</li> <li>- 8 SA-316 Alouette III</li> <li>- 1 A-109C Hirundo</li> <li>- Bell 47G Sioux</li> <li>- 10 Hawk Mk.108</li> <li>- 7 MB-339AM</li> <li>- 8 MB-339CD</li> <li>- 37 PC-7 Turbo-</li> </ul>
--	---	--

		<p>Trainer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 PC-7 MkII</li> <li>- 20 MD3-610 Datwyler, AeroTiga</li> <li>- SAL Bulldog 102</li> <li>- 2 Squadron Fokker F-28 Fellowship, Falcon 90</li> <li>- 16 Squadron Beech 200T Subang AB</li> </ul>
Kapal Perang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Unit Kapal Selam Kelas Cakra</li> <li>- 29 Unit PSC</li> <li>- 23 Unit PCC</li> <li>- 6 Fregat Kelas Ahmad Yani (Bekas dari Belanda yang dibeli pada tahun 1986/1987/1989)</li> <li>- 3 Fregat kelas Fatahillah (dibangun di Belanda pada tahun 1979/1980)</li> <li>- 1 Fregat kelas Ki Hajar Dewantara (Dibangun di Yugoslavia pada tahun 1981)</li> <li>- 4 Korvet kelas SIGMA (Ship Integrated Geometrical</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satu Kapal Selam dilengkapi meriam 20 mm</li> <li>- 11 Unit PSC</li> <li>- 185 Unit PCC</li> <li>- 2 Kapal cepat pengangkut pasukan</li> <li>- 4 Kapal Patroli buatan Perancis ber-rudal Exocet MM38 dan Meriam Bofors</li> <li>- 24 Kapal Perang yang berpangkalan di empat tempat: Sandakan, Sabah, Kuantan, dan Labuan.</li> <li>- 2 Kapal</li> </ul>

	<p>Modularity Approach), yaitu KRI Diponegoro, KRI Hasanuddin, KRI Sultan Iskandar Muda, KRI Frans Kaisiepo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 Korvet anti Kapal Selam kelas Parchim (merupakan kapal bekas yang dibeli dari Jerman Timur)</li> <li>- 4 kapal cepat roket (KCR) kelas Mandau</li> <li>- 4 Kapal patroli kelas kakap FPB-57 Nav I</li> <li>- 2 kapal cepat torpedo (KCT) kelas Ajak.</li> <li>- 2 buru ranjau (BR) kelas Pulau Rengat</li> <li>- Patroli (<i>Patrolling Force</i>) berjumlah 46 KRI</li> <li>- Pendukung (<i>Supporting Force</i>) berjumlah 48 KRI,</li> </ul>	<p>Patroli buatan Korea Selatan yang dilengkapi meriam 100 mm Creusot Loire, 30 mm Emerlac, dan Senjata penangkis Kapal Selam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Kapal buatan Swedia dilengkapi rudal MM38 Excocet, 57 mm Bofors dan 40 mm Bofors.</li> <li>- 4 Kapal Frigate</li> <li>- 6 Kapal Corvette buatan Jerman</li> <li>- 4 Kapal Patroli penangkis ranjau buatan Italia</li> <li>- 2 Kapal Multipurpose Command and Support Ship buatan Jerman dan Korea Selatan.</li> <li>- Satu Kapal Sealift</li> <li>- 2 Kapal Hydro</li> </ul>
--	---	--

Tank	350	
Artilleri	1.060 Unit Artilleri jenis T dan Mortir	780 Unit artilleri

Sumber: Harian Kompas, edisi 14 Februari 2009

Sampai tanggal 16 Agustus 2006, Militer Indonesia memiliki sebanyak 369.389 prajurit, yang terdiri dari 273.693 prajurit TNI AD, 68.180 prajurit TNI AL, 27 590 prajurit TNI AU. Apakah ini memadai atau tidak untuk wilayah Indonesia yang begitu luas yang memang masih bisa diperdebatkan. Tidak selalu kuantitas yang besar dari postur kekuatan TNI menjadi jaminan yang baik dan memadai bagi kekuatan TNI<sup>80</sup>.

Walaupun jumlah personil militer Indonesia lebih banyak dan jauh diatas Malaysia, namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dijaga, maka satu orang prajurit Indonesia harus menjaga setidaknya 650 orang penduduk Indonesia, sedangkan satu orang prajurit Malaysia hanya menjaga setidaknya 150 orang penduduknya. Hal ini karena besarnya jumlah penduduk yang dimiliki oleh Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dimilikinya. Kalau terjadi perang, jumlah penduduk yang mesti diselamatkan oleh Indonesia lebih besar. Negara Indonesia memiliki penduduk sebanyak lebih dari 241 juta orang, sedangkan Malaysia tercatat hanya sekitar 27,7 juta orang. Sementara itu untuk cakupan wilayah, seorang prajurit Indonesia bertugas menjaga sekitar 5 mil wilayah Indonesia, sedangkan setiap prajurit Malaysia hanya mengamankan sekitar 1 mil wilayahnya. Dalam hal ini saja Militer Indonesia mempunyai tugas yang lebih berat dan besar jika dibandingkan dengan tugas yang diemban oleh

<sup>80</sup> *ibid*, Hal 48

Militer Malaysia. Walaupun Indonesia memiliki jumlah prajurit yang lebih banyak dari militer Malaysia, namun untuk "perang pembukaan" tentunya akan mengandalkan kapal perang dan pesawat tempur.

Mengenai peralatan tempur yang dimiliki oleh Indonesia seperti Kapal Perang KRI Ahmad Yani, KRI Slamet Riyadi merupakan kapal perang bekas Belanda yang dibeli pada tahun 1986. KRI Kapitan Patimura, KRI Cut Nyak Dien, KRI Imam Bonjol merupakan contoh dari KRI yang sampai saat ini masih menjalankan tugasnya yang merupakan bekas dari Jerman Timur, bahkan ada KRI yang tenggelam pada saat menjalankan tugas yaitu KRI Memet Sastrawiria yang merupakan bekas dari Jerman Timur yang akhirnya tenggelam di perairan Bengkulu<sup>81</sup>.

Kekuatan kapal laut Indonesia yang kini menjadi andalan, yaitu tiga buah perusak kapal rudal kelas Fatahillah, sebuah kelas Ki Hajar Dewantara, serta 4 kapal cepat roket kelas Mandau (termasuk di antaranya KRI Rencong), dua buah kapal cepat torpedo (KCT) kelas Ajak, dua buah buru ranjau kelas Pulau Rengat. Kapal tempur milik Indonesia unggul kuantitas, walau pun produknya hampir semuanya barang bekas. Malaysia memang kalah jumlah, namun memiliki kapal generasi modern. Idealnya, untuk menjaga dan mengendalikan wilayah laut yang luasnya 6 jutaan km persegi, TNI AL memerlukan sedikitnya 478 KRI (Kapal Republik Indonesia) dan 228 pesawat udara berbagai jenis. Sementara kondisi 2003, TNI AL baru memiliki 114 KRI dan 53 pesawat udara. Kalaupun ada

---

<sup>81</sup> <http://hankam.kompasiana.com/2010/06/01/negeri-jiran-saja-peduli-untuk-meningkatkan-kekuatan-angkatan-laut-ri-bagaimana-dengan-kita/>, diakses pada 20 Oktober 2010

pertambahan, jumlahnya per tahun tidaklah signifikan. Akibatnya, pola pengamanan yang diterapkan TNI AL lebih bersifat prioritas elektif<sup>82</sup>.

Sementara itu kekuatan laut Malaysia bertumpu kepada dua buah Fregat generasi tahun 1990-an, yaitu Lekiu dan Jebat. Kedua kapal itu dilengkapi sistem data tempur modern, sehingga dalam pendeteksian kapal lawan memiliki kemampuan yang lebih unggul. Selain itu, Malaysia juga dilengkapi Fregat generasi tahun 1980-an, disamping Korvet kelas laksamana yang merupakan generasi tahun 1995<sup>83</sup>.

Di wilayah udara, kehadiran Sukhoi turut melengkapi kekuatan udara Tentara Nasional Indonesia. Sebelumnya Indonesia juga diperkuat F-16, F-5 dan Hawk yang usianya terbilang rentan. Meski begitu, jumlah pesawat tempur terutama Sukhoi terasa sangat kurang jika melihat luas cakupan wilayah Indonesia yang memiliki luas wilayah 1,9 juta mil persegi. Sedangkan negeri jiran Malaysia yang wilayahnya 329 ribu mil persegi dikawal oleh 18 unit Pesawat Sukhoi<sup>84</sup>.

Pada saat ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia mengenai Blok Ambalat, pasukan kedua negara menyiapkan peralatan perangnya termasuk diantaranya kekuatan udara. Indonesia sudah menyiapkan empat buah pesawat F-16 yang siaga untuk menghadapi pesawat-pesawat tempur Malaysia<sup>85</sup>. Namun jika dilihat dari kondisi yang ada, keempat F-16 itu adalah sebagian dari 8-10 buah F-16A/B Fighting Falcon yang dimiliki Angkatan udara Indonesia. Sisanya adalah

---

<sup>82</sup> <http://ekspresi.fajar.co.id/read/103217/19/belajar-dari-kasus-sipadanligitan>, diakses pada 21 Desember 2010

<sup>83</sup> *Ibid*, hal 60

<sup>84</sup> <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7325>, diakses pada 25 Juli 2010

<sup>85</sup> <http://nasiona1.vivanews.com/news/read/174686-kekuatan-tempur-udara-ri-malaysia>, diakses pada 26 Juli 2010

kekuatan pesawat yang sudah uzur, yaitu 12 buah F-5E/F "Tiger II", 17 buah A-4E "Sky Hawk" (keduanya generasi pesawat tahun 1960 s.d. 1970-an), disamping pesawat tempur ringan yang masih modern, yaitu 35 buah Hawk 100/200, 9 buah Hawk Mk-53, didukung pesawat generasi perang Vietnam (1960-an), yaitu 9 buah OV-10 "Bronco"<sup>86</sup>.

Yang jelas, tampaknya pengerahan F-16 oleh Angkatan Udara Indonesia itu dilakukan dengan mengoptimalkan kekuatan yang ada. Pasalnya, walau Indonesia sudah memiliki tujuh buah pesawat tercanggih buatan Rusia, Su-30 dan Su-27, namun belum sepenuhnya dapat diandalkan, karena belum memiliki sistem persenjataan alat berat. Tinggal kepada kekuatan F-16, yang itu pun menghadapi dilema persoalan suku cadang karena yang tersedia kini tinggal delapan buah dari sebelumnya 10 buah<sup>87</sup>.

Malaysia juga memiliki pesawat paling canggih buatan Russia, Sukhoi Su-30 sama seperti yang dimiliki Indonesia. Bahkan, jumlah yang dimiliki Malaysia sebanyak 18 buah, didukung sejumlah pesawat modern lainnya, MiG-29. Fulcrum juga buatan Russia. Karena anggarannya lebih banyak, tentunya Malaysia lebih kuat dalam anggaran perawatan dan pembelian suku cadang. Ini belum termasuk F/A-18D Hornet buatan Amerika Serikat yang merupakan generasi tahun 1989-1990. Pesawat-pesawat itu kelasnya sudah di atas F-16A/B yang dimiliki Angkatan Udara Indonesia, yang berasal dari generasi tahun 1970-an<sup>88</sup>.

---

<sup>86</sup> <http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/09/01/112352/Inilah-Perbandingan-Kekuatan-Militer-Indonesia-Malaysia>, diakses pada 15 November 2010

<sup>87</sup> *Ibid*, Hal 28

<sup>88</sup> *Ibid*, Hal 40

Dengan melihat kekuatan yang dimiliki oleh Militer Indonesia saat ini, maka Indonesia akan sangat kesulitan dalam menjaga wilayah perairan atau kawasan terluar jika hanya mengandalkan peralatan yang ada sekarang, terlebih lagi jika terjadi perang dengan Malaysia, maka hal ini akan sangat fatal bagi Indonesia. Lemahnya kondisi Alat Utama Sistem Pertahanan atau Alutsista Indonesia tidak saja membuat berkurangnya kemampuan pertahanan Indonesia, tetapi hal itu berikutnya juga akan melemahkan kemampuan diplomasi Indonesia. Hal itu terungkap dari buku *Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional* karya Yusron Ihza, mantan Wakil Ketua Komisi I DPR. Menyangkut kaitan antara pertahanan dan diplomasi, Yusron yang pernah memimpin delegasi Komisi I DPR ke Malaysia dalam upaya meredakan ketegangan di Ambalat menyebutkan, seandainya pertahanan Indonesia kuat, postur diplomasi Indonesia pun ketika berhadapan dengan Malaysia akan lebih kuat<sup>89</sup>.

#### **D. Persepsi Malaysia terhadap Militer Indonesia**

Selain memiliki peralatan tempur yang tergolong baru dan modern, Malaysia memiliki sistem aliansi pertahanan dengan Inggris, Australia, Singapura, serta Selandia Baru. Aliansi itu disebut sebagai *Five Power Defense Agreement* (FPDA). Salah satu kesepakatan negara-negara FPDA adalah klausul bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota merupakan serangan pula terhadap negara anggota lainnya. Malaysia tinggal meminta klausul itu diaktifkan. Bila disepakati, bukan tidak mungkin negara kita harus siap berperang juga dengan

---

<sup>89</sup> <http://idsps.org/headline-news/berita-media/pertahanan-untuk-dukung-diplomasi/> diakses pada 20 November 2010

Inggris, Australia, Singapura, serta Selandia Baru yang mempunyai kekuatan tempur jauh lebih kuat dan canggih. Tidak itu saja, bila nanti dalam konfrontasi negara kita berhadapan dengan Inggris, negara tersebut sangat mungkin meminta artikel lima NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) diaktifkan. Artikel lima NATO serupa dengan klausul perjanjian FPDA yang intinya menyatakan, serangan yang dialami salah satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap negara-negara anggota lainnya dan harus dihadapi bersama. Sehingga, konfrontasi dengan Malaysia bisa melebar serta membuat Indonesia harus berhadapan dengan negara-negara anggota NATO<sup>90</sup>.

Dengan adanya *Five Power Defense Agreement* dan Artikel lima NATO telah meningkatkan kepercayaan diri pemerintah Malaysia jika berhadapan dengan Militer Indonesia. Dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, menambah keyakinan pemerintah Malaysia, bahwa TNI akan kesulitan dalam menghadapi setiap provokasi yang dilakukan oleh Malaysia. Ditambah dengan faktor embargo yang dikenakan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap Militer Indonesia, yang menyebabkan sulitnya TNI untuk mengganti peralatan atau suku cadang yang harus diganti. Embargo militer tersebut secara perlahan telah melumpuhkan Alutsista yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini semakin menambah keyakinan dan tingkat kepercayaan diri pemerintah Malaysia jika harus konfrontasi dengan Indonesia.

Apabila Militer Indonesia melakukan penggelaran kekuatan disekitar perairan kawasan Ambalat dengan peralatan yang dimilikinya saat ini, tentulah hal

---

<sup>90</sup> <http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/09/01/112352/Inilah-Perbandingan-Kekuatan-Militer-Indonesia-Malaysia> diakses pada 15 November 2010

itu belum cukup untuk menggetarkan pihak Malaysia, hal itu dengan terbukti masih seringnya kapal perang Malaysia memasuki kawasan yang menjadi wilayah kedaulatan Indonesia tersebut. Hal tersebut telah berpengaruh pada perundingan yang dilakukan oleh kedua negara, karena pihak Malaysia merasa lebih kuat terhadap Indonesia dan mereka merasa memiliki daya tawar dan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dari Indonesia.

Kasus Ambalat merupakan satu contoh dari ketidak efektifan *deterrence effect* yang dimiliki oleh militer Indonesia dalam menunjukkan eksistensinya di wilayah Ambalat terhadap pihak Malaysia. Hal tersebut berdampak pada hasil perundingan yang tidak pasti dan terkesan berjalan lamban dan berlarut-larut dengan pihak Malaysia. Sehingga diplomasi yang dijalankan tidak efektif sebagaimana mestinya, bahwa seharusnya diplomasi dapat menegaskan bahwa kawasan Ambalat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.